ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI APLIKASI SAKTI DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Made Pramuditya Putri Ariyasa[1], Ni Nyoman Suli Asmara Yanti[2], Ida Kade Suparta[3]
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram[1,2,3]
dheaputriariyasa@gmail.com[1] suliasmara@iahn-gdepudja.ac.id[2],
idasuparta5@gmail.com[3]

Keywords:
State-Owned Assets, SAKTI, Financial Accountability, Election Commission, Asset Administration.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of State-Owned Assets (Barang Milik Negara/BMN) administration through the Institution-Level Financial Application System (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI) and to evaluate its contribution to improving data accuracy and financial accountability at the General Election Commission (KPU) of West Nusa Tenggara Province. This research employs a qualitative descriptive approach to obtain an in-depth understanding of BMN administration practices within their natural organizational setting. Data were collected through non-participant observation of source document recording processes, semi-structured interviews with structural officials and SAKTI operators, and document analysis of BMN administration records, including BMN reports, inventory lists, asset cards, and handover documents. The findings indicate that BMN administration through SAKTI has been implemented in an integrated manner through the Commitment Module, Inventory Module, and Fixed Asset Module, which supports data integration and reduces duplication of records. However, data accuracy is highly dependent on the precision of initial data input, particularly in recording source documents and selecting asset codes in the Commitment Module. Errors at this stage were found to generate inconsistencies across subsequent modules. The study also reveals that the characteristics of KPU as an election management body with high logistical asset mobility increase the risk of discrepancies between physical assets and system records if not supported by consistent physical verification and effective internal control. Therefore, although SAKTI provides a strong digital foundation, its effectiveness in enhancing BMN accountability remains highly dependent on operator competence, procedural discipline, and internal supervision.

Kata kunci: Barang Milik Negara, SAKTI, Akuntabilitas Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Penatausahaan Aset.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta mengevaluasi kontribusinya dalam meningkatkan akurasi data dan akuntabilitas keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik penatausahaan BMN dalam konteks organisasi yang alami. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan terhadap proses pencatatan dokumen sumber, wawancara semi-terstruktur dengan pejabat struktural dan operator SAKTI, serta analisis dokumen penatausahaan BMN, meliputi laporan BMN, daftar inventaris, kartu inventaris barang, dan dokumen berita acara serah terima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan BMN melalui SAKTI telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui Modul Komitmen, Modul Persediaan, dan Modul Aset Tetap, yang mendukung integrasi data dan mengurangi duplikasi pencatatan. Namun demikian, akurasi data sangat bergantung pada ketepatan penginputan data awal, khususnya dalam pencatatan dokumen sumber dan pemilihan kode aset pada Modul Komitmen. Kesalahan pada tahap ini terbukti menimbulkan ketidaksesuaian data pada modul-modul selanjutnya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa karakteristik KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan tingkat mobilitas aset logistik yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya perbedaan antara kondisi fisik aset dan data yang tercatat dalam sistem apabila tidak didukung oleh pelaksanaan inventarisasi fisik yang konsisten serta pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, meskipun SAKTI menyediakan fondasi digital yang kuat, efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas BMN sangat bergantung pada kompetensi operator, kedisiplinan dalam menjalankan prosedur, dan pengawasan internal yang memadai**.**

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara saat ini dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang semakin tinggi. Di Indonesia, tuntutan tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pengelolaan dana publik harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini juga mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari kekayaan negara. BMN memiliki peran strategis dalam mendukung operasional pemerintahan sehingga penatausahaannya harus dilakukan secara akurat dan terintegrasi agar informasi aset negara dapat disajikan secara andal (Mentri Keuangan Republik Indonesia, 2023). Hal ini juga ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bahwa keandalan data

BMN menjadi salah satu indikator utama akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (DJKN, 2023).

Sebagai upaya modernisasi pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai modul keuangan, meliputi Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Pelaporan Keuangan. Implementasi SAKTI bertujuan untuk mengurangi duplikasi pencatatan serta meningkatkan keterpaduan data antar-modul(DJPB, 2021). Selain itu, regulasi mengenai penerapan sistem terintegrasi ini juga diatur dalam Peraturan (DJPB, 2021) Nomor 171/PMK.05/2021 yang menegaskan pentingnya integrasi sistem dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAKTI memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. (Usman, 2024) menemukan bahwa penggunaan SAKTI mampu meningkatkan akurasi pencatatan aset serta memperbaiki kualitas laporan keuangan pada satuan kerja pemerintah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Al-giffary & Annisa, 2024) yang menyatakan bahwa SAKTI berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan melalui integrasi sistem dan kelengkapan informasi digital. (Rahman et al., 2023). juga menegaskan bahwa sistem keuangan terintegrasi berbasis digital mampu memperkuat pengendalian internal serta meningkatkan keandalan informasi keuangan.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi SAKTI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. (Zaenudin et al, 2024) menegaskan bahwa kompetensi operator dalam memahami kode akun, struktur transaksi, dan alur antar-modul merupakan faktor krusial dalam mencegah terjadinya kesalahan pencatatan. Hal ini diperkuat oleh (Gultom et al., 2024) yang menyatakan bahwa perbedaan kemampuan teknis antaroperator masih menjadi penyebab utama kesalahan input data yang berdampak pada ketidaksesuaian data dan penurunan kualitas laporan keuangan. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Sigarlaki et al., 2025) yang menekankan bahwa ketelitian operator, kecakapan penggunaan aplikasi, serta kesiapan organisasi sangat menentukan efektivitas penerapan sistem keuangan digital.

Digitalisasi pengelolaan keuangan melalui SAKTI juga belum sepenuhnya menghilangkan risiko kesalahan administrasi. DJKN (2023) melaporkan masih ditemukannya ketidaksesuaian antara data fisik BMN dan data yang tercatat dalam sistem pada sejumlah satuan kerja, yang menunjukkan bahwa validasi manual dan pengawasan internal tetap diperlukan. Selain itu, (Usman, 2024) mengungkapkan bahwa kesalahan pada dokumen sumber, khususnya pada tahap awal pencatatan, menjadi penyebab dominan terjadinya perbedaan data antar-modul dalam SAKTI.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks pada instansi dengan karakteristik aset yang sangat dinamis, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengelola aset logistik pemilu dengan tingkat mobilitas yang tinggi, sebaran wilayah yang luas, serta intensitas distribusi yang besar. (Mentri Keuangan Republik Indonesia, 2023) menegaskan bahwa instansi dengan karakteristik aset dinamis memerlukan sistem pencatatan yang lebih ketat. Hal senada juga disampaikan oleh (DJKN, 2023)yang menekankan pentingnya mekanisme pengendalian internal yang konsisten pada instansi dengan aset bergerak tinggi. (DJPB, 2021) menambahkan bahwa integrasi SAKTI hanya akan berjalan optimal apabila didukung oleh ketepatan input data sejak tahap awal transaksi.

Kondisi tersebut tercermin dalam Laporan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang mencatat masih adanya ketidaksesuaian antara data fisik aset logistik pemilu dan data yang tercatat dalam aplikasi SAKTI, khususnya pada periode distribusi dan pascapemilu. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa kendala teknis paling sering muncul pada tahap perekaman Berita Acara Serah Terima (BAST) di Modul Komitmen. Kesalahan dalam pemilihan kode barang atau akun menyebabkan data yang diteruskan ke Modul Aset Tetap menjadi tidak sesuai dengan kondisi riil, sehingga memerlukan koreksi ulang dan berpotensi memengaruhi kualitas pelaporan aset.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat celah penelitian terkait implementasi SAKTI pada lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada satuan kerja fiskal atau instansi teknis. Kajian mendalam mengenai penatausahaan BMN melalui SAKTI di lingkungan KPU masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penatausahaan BMN melalui SAKTI dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu dengan menekankan keterkaitan antara Modul Komitmen, kualitas input data, dan akuntabilitas aset logistik pemilu. Oleh

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penatausahaan BMN di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui aplikasi SAKTI, mengidentifikasi kendala teknis dan administratif yang muncul, serta mengevaluasi kontribusi SAKTI terhadap peningkatan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara menyeluruh dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan penafsiran data (SUGIYONO, 2022).

Lokasi penelitian dilakukan secara purposive pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi NTB dengan pertimbangan bahwa unit tersebut memiliki peran sentral dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu 10 September hingga 27 November 2025, menyesuaikan dengan siklus kegiatan administrasi dan pengelolaan aset di lingkungan KPU.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk memperoleh data yang komprehensif. Observasi non-partisipan dilakukan terhadap proses perekaman Berita Acara Serah Terima (BAST), pengolahan data aset, pencatatan persediaan, penyusunan laporan BMN, serta pola koordinasi antaroperator dalam penggunaan modul SAKTI. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan Sekretaris KPU, kepala bagian, kepala subbagian, serta operator SAKTI guna menggali informasi terkait prosedur kerja, kendala teknis, dan praktik pengendalian internal. Teknik dokumentasi juga digunakan dengan mengkaji berbagai dokumen pendukung, antara lain laporan BMN, Daftar Inventaris Barang (DIB), Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan persediaan, kontrak pengadaan, BAST, faktur, serta data hasil input pada modul SAKTI.

Instrumen penelitian meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, dan daftar cek dokumen yang digunakan untuk membantu pencatatan data secara sistematis dan terarah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan

reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, hasil analisis divalidasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan dokumen sehingga temuan penelitian mencerminkan kondisi faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (SUGIYONO, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses kerja, wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan operator SAKTI, serta telaah dokumen penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan lapangan menggambarkan secara faktual bagaimana penatausahaan BMN dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI, mencakup alur kerja antar-modul, kendala teknis dan administratif yang dihadapi, serta strategi operator dalam menjaga keakuratan data aset. Penyajian hasil penelitian diperkuat dengan kutipan wawancara untuk memastikan validitas empiris temuan.

Proses Penatausahaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi SAKTI

Hasil observasi menunjukkan bahwa penatausahaan BMN di KPU Provinsi NTB dilaksanakan secara berjenjang melalui integrasi Modul Komitmen, Modul Persediaan, dan Modul Aset Tetap. Proses diawali dengan perekaman dokumen pengadaan pada Modul Komitmen yang meliputi kontrak, faktur, dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Operator pada Modul Komitmen terlihat memeriksa dengan teliti kelengkapan dokumen sebelum melakukan input. Ia menyampaikan, “Kalau dokumennya tidak lengkap atau tidak cocok, saya tidak berani input. Harus pas dulu semua.” kesalahan pada tahap ini berpotensi memengaruhi seluruh proses selanjutnya.

Setelah data direkam, sistem secara otomatis meneruskan informasi ke Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap. Pada Modul Persediaan, operator melakukan pencatatan barang habis pakai serta pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kondisi barang. Operator menyampaikan bahwa “Untuk barang habis pakai, kami akan sek tiap akhir bulan. Kalau ada pemakaian besar, kita akan update lagi supaya tidak salah jumlahnya.”

Sementara itu, pada Modul Aset Tetap, operator melakukan verifikasi fisik aset sebelum melakukan pendetailan data, termasuk nilai perolehan, kondisi, dan lokasi

aset. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun sistem bersifat digital dan terintegrasi, pengendalian manual tetap menjadi bagian penting dalam proses penatausahaan. Dokumen pendukung seperti Daftar Inventaris Barang (DIB), Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan BMN, dan BAST mengonfirmasi bahwa alur penatausahaan telah dijalankan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dukungan Aplikasi SAKTI terhadap Keakuratan Data dan Keterpaduan Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKTI secara sistemik mendukung keterpaduan informasi antar-modul melalui mekanisme aliran data otomatis. Integrasi ini mengurangi kebutuhan entri data berulang dan mempermudah penelusuran transaksi melalui riwayat digital. Namun, penelitian menemukan bahwa kualitas akhir data yang dihasilkan oleh SAKTI sangat bergantung pada ketepatan input awal, khususnya pada tahap perekaman BAST di Modul Komitmen.Operator menyampaikan bahwa "Di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih terddapat kendala teknis cukup sering terjadi, khususnya pada saaat perekaman Berita Acara Serah Terima (BAST) di Modul Komitmen. Apabila kode barang atau akun yang dimasukan salah, maka data yang di teruskan ke modul Aset tetap akan berbeda atau tidak sesuai dengan kondisi sebenaranya.". Salah satu kasus nyata yang ditemukan adalah logistik pemilu berupa bilik suara yang tercatat sebagai peralatan kantor akibat kesalahan awal kode di Modul komitmen. Selain kesalahan input, penelitian ini juga menemukan kendala teknis berupa lambatnya respons sistem dan gangguan sinkronisasi, terutama pada periode beban kerja tinggi. Oleh karena itu, meskipun SAKTI menyediakan kerangka integrasi data yang kuat, keakuratan informasi tetap memerlukan dukungan ketelitian operator dan verifikasi fisik aset secara berkelanjutan

Kontribusi Penatausahaan BMN melalui SAKTI terhadap Akuntabilitas Keuangan

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKTI memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di KPU Provinsi NTB. Digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan BMN memungkinkan penyusunan laporan yang lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Keberadaan jejak audit digital mempermudah proses pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal serta meningkatkan transparansi pengelolaan aset. Operator menjelaskan bahwa "sekarang laporan lebih cepat, data langsung muncul di Modul lain dan kami

hanya cek kembali sebelum dikirim. Kalau bagian lain minta data, saya tinggal kirimkan file dari system tidak perlu buka map satu-satu.". Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas yang dihasilkan masih bersifat kondisional. Variasi kompetensi teknis antaroperator memengaruhi konsistensi pencatatan BMN, terutama pada periode sibuk pemilu. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menegaskan "Kalau input awalnya salah, sistem tidak dapat memperbaiki, kami harus tetap akurat sejak awal agar akuntabilitas tetap terjaga.". Oleh karena itu, SAKTI berfungsi sebagai fondasi digital yang kuat, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, ketelitian dokumen sumber, dan konsistensi pengawasan internal.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Barang Milik Negara di KPU Provinsi NTB dilaksanakan secara berjenjang melalui integrasi Modul Komitmen, Modul Persediaan, dan Modul Aset Tetap. Proses diawali dengan perekaman dokumen pengadaan pada Modul Komitmen yang meliputi kontrak, faktur, dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Operator Modul Komitmen menunjukkan kehati-hatian tinggi dalam memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum melakukan input data, karena kesalahan pada tahap ini berpotensi memengaruhi seluruh proses selanjutnya. Setelah data direkam, sistem secara otomatis meneruskan informasi ke Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa implementasi SAKTI mendorong keteraturan administrasi dan konsistensi pencatatan aset negara (Anggraini & Pancasila, n.d.). Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem tetap sangat bergantung pada ketelitian operator pada tahap awal pencatatan (Rahman et al., 2023).

SAKTI secara sistemik mendukung keterpaduan informasi antar-modul melalui mekanisme aliran data otomatis. Temuan ini mendukung pandangan bahwa SAKTI dirancang sebagai sistem keuangan terintegrasi yang memperkuat konsistensi data dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah (Punarto & Irawan, 2024). Namun, penelitian menemukan bahwa kualitas akhir data yang dihasilkan oleh SAKTI sangat bergantung pada ketepatan input awal, khususnya pada tahap perekaman BAST di Modul Komitmen. Kesalahan pemilihan kode barang atau akun menyebabkan data yang diteruskan ke Modul Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi fisik aset. Salah satu kasus nyata yang ditemukan adalah logistik pemilu berupa bilik suara yang tercatat

sebagai peralatan kantor akibat kesalahan klasifikasi awal. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem keuangan digital hanya memproses data yang dimasukkan oleh pengguna, sehingga kesalahan input akan menghasilkan informasi yang tidak akurat meskipun sistem telah terintegrasi dengan baik (Zaenudin et al, 2024). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman operator terhadap struktur modul dan kode akun merupakan penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian data dalam SAKTI (Hannisa et al., 2024). Selain kesalahan input, penelitian ini juga menemukan kendala teknis berupa lambatnya respons sistem dan gangguan sinkronisasi, terutama pada periode beban kerja tinggi. Kondisi ini konsisten dengan temuan yang menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur dan dukungan teknis masih menjadi tantangan dalam implementasi SAKTI di berbagai instansi pemerintah (Dozan et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun SAKTI menyediakan kerangka integrasi data yang kuat, keakuratan informasi tetap memerlukan dukungan ketelitian operator dan verifikasi fisik aset secara berkelanjutan (Kurniawan et al., 2025).

Penerapan SAKTI memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di KPU Provinsi NTB. Digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan BMN memungkinkan penyusunan laporan yang lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Keberadaan jejak audit digital mempermudah proses pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal serta meningkatkan transparansi pengelolaan aset. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penerapan SAKTI meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan sektor publik (Al-giffary & Annisa, 2024). Penelitian lain juga menegaskan bahwa integrasi sistem keuangan berbasis digital memperkuat pengendalian internal dan mendukung akuntabilitas pengelolaan aset negara (Tenry Nur Amrianiα, 2019). Temuan ini juga mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan implementasi sistem keuangan terintegrasi (Faraida Hakim, 2025). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa satuan kerja yang memberikan pelatihan berkelanjutan dan penguatan pengawasan internal mampu menghasilkan laporan BMN yang lebih akurat dan akuntabel dibandingkan instansi dengan dukungan SDM yang terbatas (Sigarlaki et al., 2025). Dengan demikian, SAKTI berfungsi sebagai fondasi digital yang kuat, tetapi

efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, ketelitian dokumen sumber, dan konsistensi pengawasan internal (Kurniawan et al., 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dan mendukung terciptanya pengelolaan aset negara yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur penatausahaan BMN yang dimulai dari Modul Komitmen, dilanjutkan ke Modul Persediaan, dan diakhiri pada Modul Aset Tetap mampu membangun keterpaduan data serta mengurangi duplikasi pencatatan, sehingga memperkuat kualitas laporan BMN dan laporan keuangan satuan kerja.

Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi bahwa efektivitas implementasi SAKTI sangat dipengaruhi oleh ketelitian pada tahap awal pencatatan, khususnya dalam perekaman dokumen sumber dan pemilihan kode barang serta akun pada Modul Komitmen. Kesalahan input pada tahap ini terbukti menimbulkan dampak berantai terhadap modul berikutnya dan berpotensi menurunkan keakuratan informasi aset yang dihasilkan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan SAKTI berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BMN dapat diterima, namun dengan catatan bahwa kontribusi tersebut bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, konsistensi prosedur penatausahaan, serta efektivitas pengawasan internal.

Penelitian ini juga menghasilkan temuan baru bahwa karakteristik KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan tingkat mobilitas aset logistik yang tinggi memperbesar risiko ketidaksesuaian data antara kondisi fisik dan data sistem apabila tidak diimbangi dengan verifikasi fisik yang konsisten dan disiplin administratif yang kuat. Temuan ini memperkaya kajian akuntansi sektor publik dengan menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan terintegrasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian sistem dengan karakteristik operasional organisasi pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kompetensi operator SAKTI melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan pengawasan internal pada tahap perekaman awal dokumen sumber, serta menyempurnakan standar operasional prosedur penatausahaan BMN, khususnya untuk pengelolaan logistik pemilu. Rekomendasi ini diharapkan dapat digunakan secara langsung oleh pengelola BMN sebagai upaya praktis untuk mengoptimalkan pemanfaatan SAKTI dalam menghasilkan informasi aset yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

Al-giffary, M. A., & Annisa, N. N. (2024). *Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada PPSDM Regional Bandung*. *6*(1), 128–135.

Anggraini, R. D., & Pancasila, U. (n.d.). *Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) dalam Pengelolaan Keuangan di Ditjen Binwasnaker dan K3 : Transformasi Akuntansi Digital Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) telah*. 3774–3786.

Ani Sri Murwani, R. P. A. (2023). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK*. *23*(02), 1–12.

Daeli, A. R. (2024). *Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Aplikasi Sakti) Untuk Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pengadilan*. *1*, 1–10.

DJKN. (2023). *Laporan Barang Milik Negara Audited Tahun Anggaran 2023*.

DJPB, Pembantu, U. A., & Perbendaharaan, D. J. (2022). *BARANG MILIK NEGARA (BMN)*. *2022*.

DJPB. (2021). *PERATURAN MENTRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.05/2021*. *3*, 1–72.

Dozan, W., Soemartono, T., & Pakpahan, R. T. (2025). *Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dalam Pelaporan Keuangan Pada Biro Keuangan Dan Aset Kementerian Dalam Negeri*. *6*(2), 216–230.

Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah*. *1*(1), 1–6.

Faraida Hakim, R. W. R. K. (2025). *PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI), KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. *9*(1), 2050–2070.

Gultom, F. G., Muhamad, T., & Khudri, Y. (2024). *Evaluasi Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dengan Metode Design- Reality Gap*. *8*(171), 2018–2027.

Hamid, A. (2025). *PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKTOR PUBLIC*. *2*(3), 4627–4633.

Hannisa, N. N., Ernitawati, Y., Setiabudi, U. M., Jalan, A., Diponegoro, P., Km, N., & Wanasari, K. (2024). *Pengaruh Kompetensi SDM , Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas*

Informasi Laporan Keuangan pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. *30*, 119–144.

Kurniawan, A. B., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). *Mekanisme Kesesuaian Kode Akun dan Kode Barang Milik Negara (BMN) Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Aset Negara*. *6*(5), 2931–2937.

Mentri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI*.

Mulyani, S., & Harahap, R. D. (2024). *Analisis Sistem Informasi Akuntasi (SIA) Dalam Meningkatkatkan Kinerja Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Kantor Walikota Medan*. *2*(1).

Pandini, I., Nugroho, M., & Arifin, M. (2025). *Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Dan Risiko Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jatim*. *1*, 88–98.

Prasito, Y., & Putra, U. W. (2025). *KEUANGAN DAERAH DAN PENERAPAN INTERNAL*. *3*(2), 13–20.

Punarto, N. T., & Irawan, B. (2024). *Evaluasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sakti Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dalam Rangka Meningkatan Kualitas Laporan Keuangan*. *6*(1), 1–8.

Putri, I. (2025). *IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA*. *20*(6).

Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). *ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)*. *3*(1), 64–72.

Sari, R., & Muslim, M. (2023). *Accountability and Transparency Accounting : A Systematic Review in Public Sector*. *3*(2), 90–106.

Siahay, A. Z. D. (2024). *Building Public Trust through Transparency and Accountability : A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting*. 423–430.

Sigarlaki, J. Y., Kalangi, L., & Wokas, H. R. N. (2025). *Analisis penerapan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong Papua Barat Daya menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181 Tahun 2016*. *181*, 227–236. https://doi.org/10.58784/rapi.314

Sofyani, H., Akuntansi, M., & Muhammadiyah, U. (2024). *Determinan Dan Peran Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Organisasi Perangkat Daerah*. *14*(03), 623–647. https://doi.org/10.22219/jrak.v14i3.32225

Suci Khairani, Kiki Yulanda, E. N. S. (2025). *Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Tata Kelola Keuangan Di Sektor Publik*. *25*(2), 57–66.

SUGIYONO, P. D. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

Tenry Nur Amrianiα, A. I. (2019). *Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)*. *1*(1).

Usman, K. (2024). *Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo*. *10*(1), 84–93.

Zaenudin et al. (2024). *Implementasi aplikasi sakti kementerian keuangan pada kinerja kpu*. *60*, 101–116.